

FORMULASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN MINIMARKET DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK RISKA JUITA

Kata Kunci : **Formulasi Kebijakan, Izin**

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling awal karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, Disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidak sempurnaan pengolaan tahap formulasi. Dalam hal pemecahan suatu masalah tersebut perlu diupayakan suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Formulasi Kebijakan dalam pemberian izin minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan yaitu Teori *Samodra Wibawa (1994, 13)* yaitu: Tindakan, Aktor, Orientasi Nilai. Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *Deskriptif* metode penelitian *Kualitatif* dengan cara survey. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan Memilih Lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu, Melihat fenomena banyak nya Minimareket yang berdiri di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Izin Usaha Toko Modren (IUTM). Maka muncul Pertanyaan apakah ada kebijakan tentang penataan dan pembinaan Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun *Informan* dari penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Owner Minimarket dan Masyarakat. Dan adapun *Key Informan* dari penelitian ini yaitu Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa formulasi kebijakan pemberian izin minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur. Hal ini dilihat dari ketiga indikator yang penulis tentukan, bahwa masih banyak hambatan-hambatan dalam pemberian izin minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. Hambatan nya adalah Lembaga pelaksana kurang mandiri, mereka sangat tergantung pada Aktor yang lain, Kurang nya kesepakatan di antara para Aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, Kurang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

POLICY FORMULATION GIVING MINIMARKET PERMITS IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT

ABSTRACT
RISKA JUITA

Keywords: Policy Formulation, Permission

Policy formulation as part of the public policy process is the earliest stage because the implementation and evaluation of policies can only be implemented if the policy formulation stage has been completed. Besides that, the failure of a policy or program in achieving its objectives is based largely on imperfections in the formulation stage. In terms of solving a problem it is necessary to strive for a stage or process in making public policy. The purpose of this study is to find out whether there is a Policy Formulation in the licensing of minimarkets in Kuantan Singingi Regency. The theory used is Samodra Wibawa's theory (1994, 13), namely: Action, Actor, Value Orientation. In accordance with the research problems, the type of research used is the type of research Descriptive Qualitative research methods by survey. The location of this study was conducted in Kuantan Singingi District. Reasons for Choosing a Location in Kuantan Singingi District, that is, Seeing the many phenomena of Minimareket which stands in Kuantan Singingi Regency does not yet have a Modren Shop Business License (IUTM). Then the question arises whether there is a policy on structuring and fostering Minimarkets in Kuantan Singingi Regency. The informants from this study were the One-Stop Integrated Services and Labor Investment Services, Owner Minimarkets and Communities. And as for the Key Informants of this study, the Deputy Regent of Kuantan Singingi Regency. The results of this study concluded that the formulation of the minimarkets licensing policy in Kuantan Singingi District had no Regional Regulations or Regulations that governed Regents. This is seen from the three indicators that I specify, that there are still many obstacles in the licensing of minimarkets in Kuantan Singingi Regency. The obstacle is that implementing agencies are less independent, they are very dependent on other Actors, Lack of agreement between Actors about policy objectives and how to achieve them, There is less condition for perfect communication and coordination.